

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Rita Isnaeni

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi

Email: ritaisnaeni587@gmail.com

Maftukhin Maftukhin

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi

Email: maftukhiniing@gmail.com

Titi Rahmawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi

Email: titirahmawati165@gmail.com

Jalan P. Diponegoro KM.2 Wanasari Brebes. Telp. (0283) 6199000 - Fax. (0283) 6199001, Indonesia

Korespondensi penulis: ritaisnaeni587@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine: the effect of partial and simultaneous accountability and transparency on the management of APBDes. This type of research is quantitative. The population of this research is village officials, members, VCB (Village Consultative Body) and community leaders using a sample of 50 respondents. Data collection method by distributing questionnaires to respondents directly. The technique of determining the number of samples in the study used a random sampling technique. The analysis used is multiple linear regression analysis using the SPSS 25 program. The results of the study stated that: 1) accountability had a partial effect on the management of the APBDes with a contribution of 43.4%. 2) transparency has no partial effect on the management of the APBDes. 3) accountability and transparency simultaneously affect the management of APBDes with a contribution of 56.6%. APBDes management can be explained by the variation of the two independent variables of 43.4%. More attention is needed from the government of Sarireja Village, Tanjung Subdistrict so that the management of the APBDes can be more accountable and transparent.*

Keywords: *Accountability; Transparency; APBDes Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara parsial serta simultan terhadap pengelolaan APBDes. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perangkat desa, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Metode pengumpulan data dengan cara membagikan kuisioner pada responden secara langsung. Teknik penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan teknik sample random sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan APBDes dengan kontribusi sebesar 43,4%. 2) transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan APBDes. 3) akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan APBDes dengan kontribusi 56,6%. Pengelolaan APBDes dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen sebesar 43,4%. Perlu adanya perhatian lagi dari pemerintah Desa Sarireja Kecamatan Tanjung agar pengelolaan APBDes bisa lebih akuntabel dan transparan..

Kata kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan APBDes

PENDAHULUAN

Kehadiran otonomi desa diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil pembangunan (keadilan) di seluruh desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada; kedua, memperbaiki alokasi sumber

Received Desember 25, 2023; Accepted Januari 26, 2024; Published Mei 31, 2024

* Rita Isnaeni, ritaisnaeni587@gmail.com

daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus direalisasikan¹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia². Pemerintah desa merupakan badan penyelenggara kepentingan masyarakat sehingga menjadi unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan suatu program yang telah direncanakan pemerintah desa³.

Pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi hal yang banyak dibahas. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa⁴. Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis, dan amanah (*Good Governance*).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *Good Governance*. *Good governance* merupakan suatu kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁵. Dalam Peraturan Presiden No. 101 tahun 2000, *Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat⁶.

Akuntabilitas publik adalah tanggungjawab pemegang amanah untuk menjamin akuntabilitas, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi amanah yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut⁷. Selanjutnya, Transparansi memiliki arti keterbukaan dan pertanggungjawaban organisasi publik dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan semua aktivitas pengelolaan sumber-sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan⁸.

Penelitian memiliki alasan tersendiri dalam memilih program APBDes dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan

program ini memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah Desa/Kelurahan di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian skripsi dengan judul : **“Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes”**.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak hanya terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dan sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan⁹.

Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya¹⁰. Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta¹¹.

Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa adalah suatu wilayah yang dimana jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri : pergaulan hidup yang saling mengenal antara penduduk dan kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam¹². Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat dan keanekaragaman yang istimewa yang hidup secara tradisional dan adat istiadat mereka dengan peraturan yang

mereka buat untuk mereka sendiri demi mencapai kesejahteraan dan kedamaian serta kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah. Sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 4 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebagai berikut: “APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa¹³. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa diperlukan adanya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya¹⁴.

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Bab IV Pasal 1 dijelaskan bahwa APBDes terdiri atas: 1) Pendapatan desa; 2) Belanja desa; 3) Pembiayaan desa. Adapun Siklus pengelolaan Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Good Governance

Good governance merupakan tata pemerintahan yaitu sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dan masyarakat dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka⁵. Landasan untuk mengetahui serta memahami *good governance* adalah dengan cara memahami prinsip-prinsip *good governance* sendiri. Dengan melihat prinsip-prinsip dari *good governance* akan didapatkan tolak ukur kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Prinsip-prinsip *good governance* berfungsi mengukur kinerja seseorang, sudah baik atau buruk kah suatu pemerintahan yang dilakukan.

Prinsip dan karakteristik *good governance* selain sebagai tolak ukur pengukuran kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan juga berperan penting dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab. Sehingga prinsip dan karakteristik *good governance* menjadi penting untuk diperhatikan dalam proses penyelenggaraan negara. Gambir Bhatta (1996) dalam ¹⁵ mengungkapkan bahwa unsur-unsur utama *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia. Karena itu, setidaknya-tidaknya ada empat prinsip utama sebagai unsur *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan aturan hukum.

Akuntabilitas

Berkembangnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia sejak era reformasi telah mendorong penerapan *good governance* di semua tingkatan pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat, dan akuntabilitas ¹⁶. Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas ¹⁷. Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas ¹⁸.

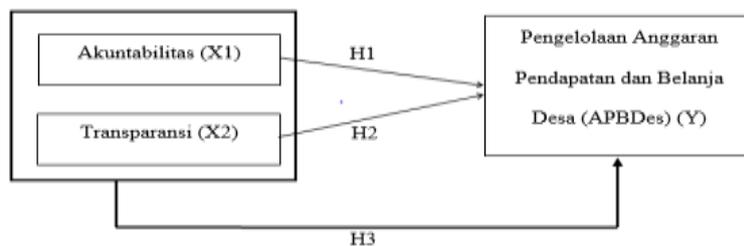
Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta

pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat¹⁰. Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi¹⁹.

Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik dikarenakan terdapat hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif dikarenakan pendekatan yang digunakan didalam penelitian, turun kelapangan, analisa data menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dan penelitian dilakukan di Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Populasi dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang berjumlah 50 orang dan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sample random sampling dimana setiap anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel pada penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dengan skala likert dari 1 sampai 5 yang yaitu (1) sangat tidak setuju (2) sangat setuju (3) netral (4)setuju (5) sangat setuju. Kemudian nilai-nilai alternatif jawaban diproses dan diolah untuk digunakan sebagai alat ukur variabel yang diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 25

dengan menggunakan metode analisis data diantaranya: Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, dan Regresi Linier Berganda.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dilakukan dengan cara mengamati dimensi, sisi-sisi, ciri-ciri perilaku dari suatu konsep, kemudian menerjemahkan dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi dan diukur agar dapat dibuat atau dikembangkan indeks pengukuran dari konsep-konsep tersebut²⁰. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:43) Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian peneliti, karena variabel ini yang sering dianggap sebagai masalah penelitian. Dalam penelitian ini, Pengelolaan APBDes menjadi variabel dependen yang dinotasikan sebagai variabel Y.

2. Variabel Independen (X)

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:42) Variabel independen adalah variabel dapat mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, perubahan nilai (*variance*) pada variabel independen dapat menyebabkan perubahan nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang digunakan, pertama adalah

Akuntabilitas sebagai variabel X1 dan yang kedua adalah Transparansi yang dinotasikan sebagai variabel X2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan APBDes di Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan mengambil sampel sebanyak 50 responden. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan lama bekerja. Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Deskripsi Profil Responden

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	42	84%
	b. Perempuan	8	16%
	Jumlah	50	100%
2	Usia		
	a. 20 – 30 Tahun	3	6%
	b. 31 – 40 Tahun	11	22%

	c. 41 – 50 Tahun	21	42%
	d. > 50 Tahun	15	30%
	Jumlah	50	100%
3	Pendidikan		
	a. SD	24	48%
	b. SMP	6	12%
	c. SMA/SLTA	12	24%
	d. Diploma	2	4%
	e. Sarjana (S1)	6	12%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap variabel akuntabilitas dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Pernyataan	Alpha	rtabel	rhitung	Keterangan
1	0,05	0,279	0,464	Valid
2			0,658	Valid
3			0,731	Valid
4			0,837	Valid
5			0,561	Valid
6			0,550	Valid
7			0,565	Valid
8			0,565	Valid
9			0,544	Valid
10			0,352	Valid
11			0,764	Valid
12			0,567	Valid
13			0,640	Valid
14			0,441	Valid
15			0,441	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai signifikan rhitung seluruh butir pernyataan lebih besar dari rtabel. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Akuntabilitas adalah valid. Sedangkan untuk hasil uji validitas terhadap variabel transparansi sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Transparansi

Pernyataan	Alpha	rtabel	rhitung	Keterangan
1	0,05	0,279	0,726	Valid
2			0,726	Valid
3			0,620	Valid
4			0,546	Valid
5			0,813	Valid
6			0,546	Valid
7			0,400	Valid
8			0,288	Valid
9			0,326	Valid
10			0,298	Valid
11			0,659	Valid
12			0,659	Valid
13			0,297	Valid
14			0,471	Valid
15			0,648	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai signifikan rhitung seluruh butir pernyataan lebih besar dari rtabel. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Transparansi adalah valid. Sedangkan untuk hasil uji validitas terhadap variabel pengelolaan APBDes sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengelolaan APBDes

Pernyataan	Alpha	rtabel	rhitung	Keterangan
1	0,05	0,279	0,818	Valid
2			0,513	Valid
3			0,735	Valid
4			0,775	Valid
5			0,676	Valid
6			0,898	Valid
7			0,872	Valid
8			0,674	Valid
9			0,704	Valid
10			0,569	Valid
11			0,559	Valid
12			0,731	Valid
13			0,377	Valid
14			0,875	Valid
15			0,875	Valid
16			0,735	Valid
17			0,815	Valid
18			0,819	Valid
19			0,890	Valid
20			0,624	Valid
21			0,317	Valid
22			0,682	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai signifikan rhitung seluruh butir pernyataan lebih besar dari rtabel. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Pengelolaan APBDes adalah valid.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel transparansi dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,814	Reliabel
Transparansi	0,778	Reliabel
Pengelolaan APBDes	0,938	Reliabel

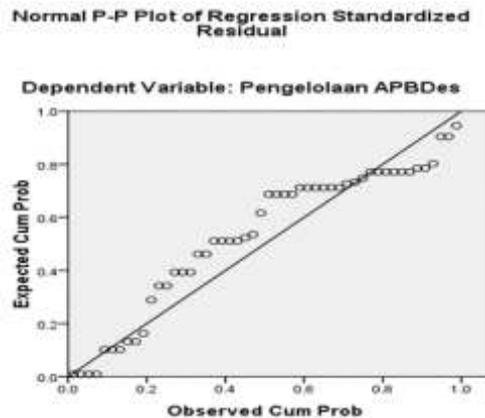
Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* atas variabel akuntabilitas sebesar 0,814, variabel transparansi sebesar 0,778 dan variabel pengelolaan APBDes sebesar 0,938 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil pengujian untuk normalitas data variabel X1, variabel X2, dan variabel Y menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized residual*.

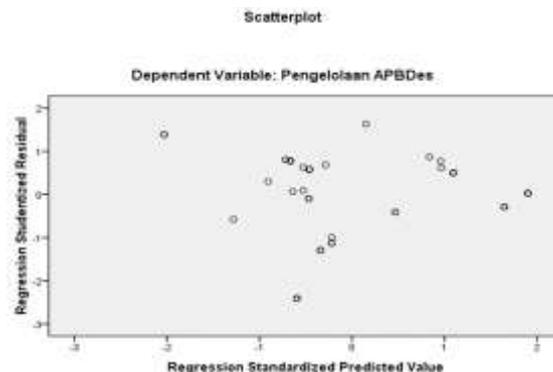


Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan bahwa titik-titik atau pola menyebar disekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik *Scatterplot* menyebar merata tanpa membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Mutikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-17.958	17.383		-1.033	.307		
	Akuntabilitas	1.280	.386	.543	3.317	.002	.431	2.318
	Transparansi	.408	.405	.165	1.009	.318	.431	2.318

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBDes

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan data Tabel 6, dapat diketahui bahwa variabel Akuntabilitas memiliki nilai Tolerance $0,431 \geq 0,10$ dan VIF $2,318 \leq 10$ sedangkan variabel Transparansi memiliki Tolerance $0,431 \geq 0,10$ dan VIF $2,318 \leq 10$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda berdasarkan output dari software SPSS yang digunakan dalam mengolah data, hasil ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17.958	17.383		-1.033	.307
	Akuntabilitas	1.280	.386	.543	3.317	.002
	Transparansi	.408	.405	.165	1.009	.318

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBDes

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.10, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -17.958 + 0.543 X_1 + 0.165 X_2 + e$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini menggambarkan adanya hubungan yang positif antara variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan APBDes, yang berarti bahwa semakin meningkatnya akuntabilitas dan transparansi maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes. Dari hasil analisis regresi diatas maka dapat diinterpretasikan hasilnya sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -17.958, nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika

variabel independen akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai pengelolaan APBDes adalah -17.958.

2. Variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,280. Nilai koefisien akuntabilitas memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi pengelolaan APBDes. Hal ini berarti, bila akuntabilitas meningkat sebesar kelipatan 1% kali maka akan mempengaruhi pengelolaan APBDes dan ikut meningkat yaitu sebesar 1,280 pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan), demikian juga sebaliknya.
3. Variabel Transparansi (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,408. Nilai koefisien transparansi memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi pengelolaan APBDes. Hal ini berarti, bila transparansi meningkat sebesar kelipatan 1% kali maka akan mempengaruhi pengelolaan APBDes dan ikut meningkat yaitu sebesar 0,408 pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan), demikian juga sebaliknya.

Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individual didalam menerangkan variabel terikat. Suatu variable bebas dinyatakan mempunyai konsekuensi terhadap variabel terikat, apabila variabel tersebut berhasil uji signifikansi, apabila signifikansi $\leq 0,05$, asumsi diterima. Sedangkan apabila signifikansi $\geq 0,05$, maka asumsi ditolak ²¹.

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17.958	17.383		-1.033	.307
	Akuntabilitas	1.280	.386	.543	3.317	.002
	Transparansi	.408	.405	.165	1.009	.318

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBDes

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, adapun pengaruh variabel Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel Pengelolaan APBDes secara parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji hipotesis pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan APBDes

Pengaruh Akuntabilitas ditunjukkan dengan nilai thitung 3,317 > ttabel 1,677 dan nilai koefisien menunjukkan angka positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan APBDes.

2. Uji hipotesis pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan APBDes

Pengaruh Transparansi ditunjukkan dengan nilai thitung $1,009 < t_{tabel} 1,677$ dan nilai koefisien menunjukkan angka negatif dengan nilai signifikansi sebesar $0,318 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_2 ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian, Transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengelolaan APBDes.

Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukkan didalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat ²¹.

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2251.559	2	1125.780	19.780	.000 ^a
	Residual	2674.941	47	56.914		
	Total	4926.500	49			
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas						
b. Dependent Variable: Pengelolaan APBDes						

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai Fhitung $19,780 > F_{tabel} 3,19$ dan nilai signifikansi (sig.) $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan APBDes.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinan adalah suatu indikator yang dipergunakan untuk mendeskripsikan berapa banyak perbedaan yang dijelaskan didalam model. Pada *output* SPSS, koefisien determinan terdapat tabel model *summary* dan tercatat tabel model summary dan tercatat R square dikatakan baik jika diatas 0,5. Sebab nilai R Square sekitar 0 sampai 1 ²¹.

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 ^a	.457	.434	7.54411
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas				
b. Dependent Variable: Pengelolaan APBDes				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,457, hal ini mengandung arti bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y sebesar 45,7 % dan 54,3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak menjadi variabel didalam penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Akuntabilitas memiliki arah yang positif terhadap Pengelolaan APBDes. Hal ini didukung dengan hasil thitung lebih besar dari pada ttabel yaitu ($3,317 > 1,677$) dan memiliki pengaruh dengan besaran 43,4%. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,002 yang menunjukkan bahwa nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,002 < 0,05$) maka H1 diterima H0 ditolak; 2) Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes. Hal ini didukung dengan hasil thitung lebih kecil dari pada ttabel yaitu ($1,009 < 1,677$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,318 menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,318 > 0,05$) maka H1 ditolak dan H0 diterima; 3) Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes. Hal ini didukung dengan hasil (Fhitung $19,780 > Ftabel 3,191$). Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari *level of significant* yaitu ($0,000 < 0,05$) yang artinya akuntabilitas dan transparansi terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pengelolaan APBDes.

SARAN

Pemerintan Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes harus bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes. Pemerintah harus melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap pengelolaan APBDes, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes sudah efektif sebaiknya tetap dipertahankan dan ditingkatkan dan untuk penelitian selanjutnya, masih terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, maka diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan melibatkan variabel-variabel yang belum diteliti dan diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan objek penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

Zitri I. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Gorontalo J Gov Polit Stud.* 2020;3(2):070. doi:10.32662/gjgops.v3i2.1128

Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Published online 2014.

- Zukaikah S, Nuraina E, Styaningrum F. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. *J Pendidik Akunt FKIP Univ PGRI Madiun*. 2018;(113):32.
- Permendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Published online 2014.
- Ultafiah W. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan. Univ Muhammadiyah Palembang. Published online 2017.
- Presiden. Peraturan Presiden No. 101 tahun 2000 Tentang Good Governance. Published online 2000.
- Herawati T. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR – Study Account Res*. 2014;XI(1):1-14.
- Ramadanis, Ahyaruddin M. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin *). *J Akunt dan Ekon*. 2019;9, No 1:1-9.
- Santoso U, Pambelum YJ. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *J Adm Bisnis*. 2008;2(1):14-33. doi:10.29313/bcsa.v2i1.625
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Andy Offset. Published online 2002.
- Bastian I. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. Published online 2006.
- Antoni R. pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir. Published online 2019:1-33.
- Mafzatun C, Rahman B, Andirfa M. Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gambong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gambong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. *Progr Stud Akunt STIE Lhokseumawe dan FISIP Univ Malikussaleh Abstr*. 2017;3(November):34-45.
- Mubarak H. Efektivitas Anggaran Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan Manusia (Studi Analisis di Desa Sepahat , Kecamatan Bandar Laksamana). 2021;2(1).
- Srijanti, A. Rahman, Purwanto S.K. Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat. Published online 2006.
- Sari RM. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *J Komplek*. 2015;7(2):139-148.
- Miftahudin. Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *Fak Ekon Univ Islam Indones Yogyakarta*. Published online 2018.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. yogyakarta Andi Offset. Published online 2014.

Hamid A. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance. *J Akunt Islam Alauddin Makasar*. Published online 2016:1-164.

Nuryaman, Christina V. *Metologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis. Teor Dan Prakt.* 2015;Cetakan Pe(Bogor: Ghalia Pustaka).

Ghozali I. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Dipenogoro. Published online 2016.